

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Dwiyola Indah Ramadhani

NPP. 30.0236

Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Puublik

Email: dwiyola.indah1012@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., MH

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *Kampar Regency has vast peatlands that have the potential to be used as agricultural land and plantations. Therefore, to take advantage of the land use value, communities or companies clear land by burning it. This is the main cause of forest and land fires that occur in Kampar Regency.* **Purpose:** *The purpose of this study was to determine the Implementation of Forest and Land Fire Disaster Management in Kampar District, Riau Province* **Method:** *The method used in this study is descriptive qualitative with interviews, observations and documents as data collection techniques.* **Result:** *The findings obtained by the authors in this study are that the delivery of information or outreach related to the fire prevention program has not been maximized, the resources for implementing staff have been sufficient, facilities and infrastructure are still limited, incentives for implementing staff have been fulfilled, the system for appointing bureaucrats at BPBD has not been maximized, and good relations and cooperation with other relevant agencies.* **Conclusion:** *This study shows that the implementation of forest and land fire prevention in Kampar Regency is still not optimal, because socialization related to fire prevention efforts is not sustainable which results in a lack of knowledge possessed by people in fire-prone areas. In addition, limited infrastructure is also an obstacle in overcoming forest and land fires in Kampar District.*

Keywords: *BPBD, Implementation, Forest and Land Fire Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kabupaten Kampar memiliki lahan gambut yang sangat luas yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Karenanya, untuk memanfaatkan nilai guna lahan tersebut, masyarakat ataupun perusahaan membuka lahan dengan cara membakarnya. Hal ini menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. **Hasil/Temuan:**

Temuan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah penyampaian informasi atau sosialisasi terkait program penanggulangan kebakaran belum maksimal, sumber daya staff pelaksana sudah memadai, sarana dan prasarana masih terbatas, insentif bagi para staff pelaksana sudah terpenuhi, sistem pengangkatan birokrat di BPBD belum maksimal, serta hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sudah baik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar sudah berjalan cukup baik namun masih belum maksimal, dikarenakan sosialisasi terkait upaya penanggulangan kebakaran tidak bersifat berkelanjutan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana kebakaran. Selain itu, sarana prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: BPBD, Implementasi, Penanggulangan Karhutla

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Bencana tersebut menjadi salah satu dari permasalahan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia hampir setiap tahunnya, terutama pada musim kemarau. (Putra et al., 2018). Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi alam ataupun ulah manusia yang ditandai dengan menjalarnya api dan menghanguskan segala sesuatu yang dilaluinya.

Menurut Sukanto (2015:11) persentase penyebab kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh alam lebih rendah daripada persentase yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Merokok didekat vegetasi dapat menyebabkan kebakaran. Perokok sengaja melemparkan puntung rokok yang belum sepenuhnya padam juga dapat menyebabkan kebakaran. Penyebab lainnya dapat ditimbulkan karena api unggun yang sepenuhnya tidak padam. Api unggun yang belum sepenuhnya mati dan ditinggalkan begitu saja, lama kelamaan akan membesar karena tiupan angin dan tanaman kering didekatnya, hal itu dapat membuat api semakin membesar karena vegetasi disekitar api unggun yang mudah terbakar terkena percikan api. Beberapa tindakan kecil tersebut dapat membawa dampak yang besar bagi kehidupan dan ekosistem makhluk hidup lainnya. Kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan musnahnya keanekaragaman hayati dan hewani di dalam hutan serta rusaknya ekosistem hutan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak buruk pada keanekaragaman hayati dan hewani, tetapi juga kerugian material, korban jiwa dan dampak ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat meningkatkan suhu permukaan bumi. Dampak lain yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ialah timbulnya kabut asap yang mencemari udara sehingga muncul gangguan saluran pernafasan seperti asma, Infeksi Saluran Pernafasan atas (ISPA), dan penyakit Paru Obstruktif Kronik (Syaufina, L. (2002:57)).

Kebakaran hutan tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan, tetapi juga dapat terjadi di luar daerah kawasan hutan, lahan gambut, atau bahkan tanah mineral. (Saharjo, 1997; Page et al, 2022; Syaufina, 2008). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada rawa gambut biasanya lebih susah untuk dikendalikan karena api dengan cepat menjalar melalui biomassa di atas permukaan tanah dan lapisan gambut di bawah permukaan tanah (Sumantri, 2007).

Indonesia merupakan sebuah negara dengan lahan gambut yang diperkirakan seluas 20,6 juta ha atau sekitar 10,8% dari seluruh luas daratan di Indonesia. Lahan gambut tersebut tersebar pada 4 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera seluas 35 %, Pulau Kalimantan seluas 32%, Papua seluas

30%, dan Pulau Sulawesi seluas 3% (Wibowo dan Suyatno, 1998). Sedangkan luas lahan gambut di Pulau Sumatera didominasi oleh Provinsi Riau yaitu sekitar \pm 4,04 juta ha atau sekitar 56,1% (Wahyunto et al., 2003). Bahaya kebakaran lahan gambut adalah salah satu bencana yang menjadi perhatian semua orang yang dapat menyebabkan dampak dan kerugian serius pada manusia dan lingkungan sekitar.

Salah satu provinsi yang seringkali mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Provinsi Riau yang terjadi hampir setiap tahunnya. Tahun 2014 lalu, Provinsi Riau mengalami peristiwa kebakaran hutan yang sangat dahsyat sehingga pemerintah Indonesia menetapkan sebagai status tanggap darurat (PPES, 2014). Kemudian pada tahun 2015, Provinsi Riau mengalami kebakaran hutan yang mencapai titik terparah pada bulan Juni hingga November. Sekitar 186.069 hektar lahan terbakar, sebagian besar merupakan lahan gambut yang mengakibatkan api sulit dipadamkan. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar sehingga mengakibatkan kebakaran hutan Provinsi Riau pada tahun 2015 menjadi kebakaran hutan terbesar setelah tahun 1997 (Purwanto, 2019).

Beberapa daerah di Provinsi Riau yang menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut ialah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir serta Kabupaten Meranti (Republika, 2016).

Salah satu wilayah administratif terluas di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar dengan luas wilayah sekitar 1.128.928 hektar. Potensi lahan gambut yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar adalah sekitar 191.363 hektar (Nana. S, 2018). Sebagian dari luasan tersebut ialah lahan gambut tipis dan selebihnya bervariasi, mulai dari gambut sedang hingga gambut dalam. Hal ini menunjukkan tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, terutama pada musim kemarau.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Lahan gambut yang luas di wilayah Kabupaten Kampar sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karenanya, untuk memanfaatkan nilai guna hutan dan lahan tersebut masyarakat ataupun perusahaan membuka lahan dengan cara membakarnya. Mayoritas dari masyarakat menganggap bahwa membakar lahan ialah metode tercepat dan termudah dalam pembukaan lahan (Febrie et al., 2017). Dengan cara membakar akan lebih menghemat pengeluaran dalam pembukaan lahan. Budaya pertanian dari zaman dahulu sudah mengajarkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah diajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki anggapan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar akan membuat tanah semakin subur (Tahrin et al., 2015).

Masyarakat ataupun perusahaan berfikir akan lebih efisien membuka lahan dengan membakar tanpa berfikir dan melihat dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak buruk sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, kabut asap yang mengganggu jarak pandang terutama untuk transportasi penerbangan, diliburkannya proses belajar mengajar di sekolah, hingga munculnya berbagai macam penyakit saluran pernafasan yang dapat mengancam kehidupan. (Steven, 2022)

1.3 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Akan tetapi, mereka lebih banyak menyoroti tentang tanggap darurat bencana seperti penelitian oleh Ismi Hariyati (2019), yang berjudul “Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di

Kota Palangkaraya”. Hasil penelitian ini ialah penanganan tanggap darurat kebakaran hutan yang terjadi di Palangkaraya dengan kemampuan, ketersediaan alat dan personel yang dimiliki sudah efektif, dengan membentuk satgas dengan fokus yang jelas pada tugas-tugas yang dapat bekerja secara optimal dan efisien.

Selain itu ada juga yang meneliti mengenai strategi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seperti penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman, dkk (2020) yang berjudul, “Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anjarlea Mukti (2015) yang berjudul “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan dan dampak kebakaran hutan yang menjadi permasalahan lingkungan di Indonesia.

Selain itu, ada juga yang meneliti mengenai efektivitas penanggulangan bencana seperti halnya penelitian Siti Muthmainnah (2022) yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penanggulangan kebakaran permukiman yang terjadi di Kota Langsa tergolong belum efektif dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Terdapat juga penelitian lain yang menyoroti tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana seperti penelitian oleh Indyah Hayu (2007) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana” (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, variabel yang digunakan memiliki perbedaan dengan penelitian Ismi Hariyati, Anjarlea, Siti, maupun Arif Rachman dkk. Fokus penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian Siti Muthmainnah. Sehingga penelitian ini menjadi menarik karena masih kurangnya penelitian yang membahas tentang implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama yang terjadi di Kabupaten Kampar.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Creswell (2016: 4), penelitian dengan metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu atau kelompok untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu desain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan secara umum dan untuk mendeskripsikan permasalahan pada saat ini. Sugiyono (2013:20) berpendapat bahwa desain deskriptif adalah gambaran objek yang akan diteliti secara lengkap. Deskriptif merupakan penjelasan yang berisi informasi yang rinci menggambarkan sesuatu dalam bentuk narasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif diawali dengan mengkaji data yang didapat dari berbagai macam sumber, baik melalui kegiatan wawancara, observasi ataupun dari dokumentasi. Data terlebih dahulu dibaca, diteliti, diverifikasi dan dipahami untuk disajikan dengan tambahan interpretasi data tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III (2010) untuk mengkaji implementasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

Komunikasi ialah kegiatan penyampaian informasi, gagasan atau berita kepada orang lain yang menjadi penerima informasi dengan harapan informasi atau berita yang diterima sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Edward III (1980) dalam Winarmo (2012) menyampaikan bahwa “komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan.” Masyarakat kabupaten Kampar selaku kelompok sasaran menerima komunikasi langsung dari para implementor (pelaksana kebijakan).

Tujuan dari adanya komunikasi ialah agar masyarakat mengetahui dengan jelas keadaan yang terjadi di lapangan, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan agar tercapainya tujuan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan baik dan maksimal.

Dari berbagai data yang diperoleh tersebut menjelaskan bahwa faktor komunikasi terkait program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD sudah cukup baik, transmisi komunikasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisai kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Kejelasan komunikasi sudah tertuang dengan cukup jelas didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga para pelaksana dapat memahami dengan baik.

Hasil penelitian mengenai faktor komunikasi yang dilakukan pada implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Kampar belum menyeluruh dan berlanjut kepada daerah berpotensi bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.2 Sumber Daya

Faktor sumber daya sangatlah berperan penting karena faktor ini merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya suatu kebijakan. Walaupun perintah implementasi diteruskan secara jelas dan konsisten, tapi jika dalam pelaksanaannya sumber daya tidak memadai maka implementasi cenderung tidak berjalan secara maksimal. Implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tentunya dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia di Kabupaten Kampar. Sumber daya yang dimaksud ialah staff pelaksana yang berintegritas dan kompeten sesuai dengan bidangnya dan memiliki kewenangannya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh sarana, prasarana, serta anggaran yang tersedia.

3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana sangat penting untuk implementasi karena jika para pelaksana memiliki sikap positif dan memberi dukungan terhadap adanya implementasi maka suatu kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi, jika para pelaksana menolak terhadap adanya implementasi kebijakan maka dalam pelaksanaannya implementasi akan mengalami beberapa kendala.

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen dari para pelaksana agar tercapainya keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa: Pertama, dalam pengangkatan birokrat di BPBD Kabupaten Kampar belum maksimal, karena tidak didasari oleh pengalaman yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, namun untuk mengatasi hal tersebut BPBD Kabupaten Kampar terus melakukan pelatihan internal yang diberikan kepada aparatur agar memiliki kompetensi khususnya dalam bidang penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kedua, pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan sudah maksimal, karena para pelaksana kebijakan di BPBD Kabupaten Kampar menerima insentif atau tunjangan kerja setiap bulannya untuk mendorong dan memotivasi para pelaksana kebijakan untuk bekerja lebih optimal.

3.4 Struktur Birokrasi

Tolak ukur keberhasilan implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang lain ialah memerlukan adanya dukungan dari birokrasi dimana suatu institusi menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Kebijakan yang kompleks memerlukan adanya kerjasama dengan kelompok atau organisasi lain untuk memaksimalkan tercapainya implementasi suatu kebijakan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas pokok untuk menetapkan dan mengembangkan kebijakan terkait penanggulangan bencana dan bagaimana menanggapinya secara cepat, akurat, dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan badan pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada bidang Perlindungan Masyarakat dengan Kepala Badan sebagai pemimpinnya dan melalui Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait lainnya seperti Dinas Pemadam Kebakaran yang sejalan dengan keahlian yang dimiliki serta membantu BPBD dalam penyediaan air untuk pemadaman, sehingga pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang dilakukan menjadi lebih optimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait atau aspek fragmentasi sudah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan wawancara terkait struktur birokrasi menunjukkan bahwa: Pertama, BPBD Kabupaten Kampar telah memiliki Standart Operating Procedure (SOP) dimana dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kedua, faktor Fragmentasi atau koordinasi dengan instansi terkait sudah dilaksanakan

secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih optimal.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adanya pelaksanaan program penanggulangan bencana memberikan dampak positif di berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Kampar karena melalui program ini masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Kabupaten Kampar. Temuan yang penulis dapatkan yaitu staff pelaksana dalam program ini melaksanakan tugas dengan baik karena adanya insentif yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan program, serta adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam melaksanakan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini. Sama halnya dengan temuan Ismi Hariyati (2019), bahwa dengan kekuatan personel yang sudah efektif, dapat dibentuk satgas dengan fokus yang jelas pada tugas-tugas sehingga dapat bekerja secara optimal dan efisien.

Layaknya program lain, program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan belum bersifat berkelanjutan, selain itu sarana prasarana sebagai faktor pendukung dalam program ini masih belum maksimal sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan layaknya temuan Siti Muthmainnah (2022).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar yakni kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi di lahan gambut dan melewati medan yang sulit dijangkau, dan terbatasnya sarana prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan program kerja yang bertujuan untuk meminimalisir luas lahan yang terbakar. Adapun indikator implementasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Edward III, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar sudah berjalan, namun belum maksimal karena intensitas sosialisasi perlu ditingkatkan dan berkelanjutan.
2. Sumber daya, yaitu kualitas dan kuantitas dari staff pelaksana yang dimiliki sudah memadai, akan tetapi sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kampar masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih terdapat kendala.
3. Disposisi, yaitu sikap pelaksana dalam menjalankan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dari segi pengangkatan birokrat di BPBD masih belum dilaksanakan secara maksimal karena latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh staff pelaksana masih terbatas.
4. Struktur Birokrasi, yaitu pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah cukup baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penanggulangan, B., Daerah, B., Kampar, K., Penanggulangan, B., & Daerah, B. (2022). *Rencana strategis* (Issue 0762).
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran edisi 4 terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Imam Gunawan. Pendidikan*.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Pers
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurjanah, dkk. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- PPES [Pusat Pengelola Ekonomi Sumatra]. (2014). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Asap 26 Februari –4 April 2014. Pekanbaru : Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatra.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Dian Rakyat.
- Siagian, P. (2001). *Organisasi dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Kapita Selekta Kepegawaian Indonesia*. Bandung: Buku Literatur IPDN.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi (terjemahan)*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto. (2015). *Manajemen Antisipasi Bencana*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Syaufina, L. (2008). *Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: perilaku api, penyebab, dan dampak kebakaran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ulum, C. 2014. *Manajemen Bencana (Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif)*. Malang: UB Press